hilir migas

BPH MIGAS

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI HILIR MIGAS

Edisi 4 | 2025



BPH MIGAS PASTIKAN KETERSEDIAAN BBM DAN GAS BUMI TERJAGA



hilir migas Edisi 4 | 2025

Redaksi

DITERBITKAN OLEH
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

PEMBINA
Kepala BPH Migas

PENGARAH
Komite BPH Migas

PIMPINAN UMUM
Sekretaris BPH Migas: Patuan Alfon S.

REDAKTUR AHLI
Direktur BBM: Soerjaningsih,
Direktur Gas Bumi: Muhidin

PIMPINAN REDAKSI
Koordinator Humas: Arid Riza Abadi

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Subkoordinator Komunikasi: Thoriq Ramadani,
Subkoordinator Layanan Informasi Publik: Utami Hikmaasih

REDAKSI
Nuryanti Wijayanti, I Ketut Gede Aryawan, Idham Baridwan, Anwar Rofiq, Doddy Harryanto, Taufiq Martakusuma, Dea Prasasti, Qodri Febrilian Erahman, Raden Mas Irawan, Dedi Armansyah

EDITOR
Narcicy Makalew, Ade Mahendra, Deydeandy Iztiqfari, Tursilo Wulan Wahyu Hastuti

PELIPUTAN
Ajipamuji Awaludin, Imam Sofwan, Julian Hadi Prasetyo, Didik Wiyarto, Suci Rahayu, Bella Anastasya Achita Putri, Ricky Andrianto, Fauzi Anwar, Hafiz Daryansyah, Okky Noviansyah, Yusfiantin Seli Agustina, Wulan Novera, Rusyda Ghina Fadianti

DOKUMENTASI & SIRKULASI
Imam Sofyan, Ajipamuji Awaludin, Ricky Andrianto, Fauzi Anwar

komunikasi@bphmigas.go.id, humas@bphmigas.go.id
www.bphmigas.go.id

BPH MIGAS PASTIKAN
KETERSEDIAAN BBM DAN GAS BUMI TERJAGA

Tahun 2025 menjelang akhir. Ada banyak hal yang kita lalui bersama di tahun ini. Sebagian merupakan capaian positif, sedangkan sejumlah hal lainnya perlu ditingkatkan.

Tahun boleh berganti. Namun, tekad BPH Migas tetap sama: menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekad ini tak tergerus tatkala tantangan datang. Justru sebaliknya, menguat seiring terwujudnya 'rasa' kebersamaan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara adil dan merata.

Berbagai upaya yang telah, sedang, dan terus dilakukan dalam menjaga ketersediaan BBM dan gas bumi di Tanah Air. Sebut saja pengawasan. Bersinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan, BPH Migas secara berkala mengawasi ketersediaan BBM dan gas bumi sepenjang tahun. Terlebih, pengawasan ditingkatkan menjelang dan selama periode tertentu, seperti libur Natal dan tahun baru dengan memimpin posko satgas nasional.

Selain pengawasan, BPH Migas juga menyempurnakan berbagai peraturan, mulai dari tata cara pelaporan dan verifikasi iuran badan usaha, penyediaan cadangan operasional BBM, hingga pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Seluruh regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan iklim usaha yang sehat.

Itu hanya sebagian dari langkah konkret BPH Migas dalam menjaga ketersediaan BBM dan gas bumi. Upaya-upaya di atas dan lainnya tetap dilakukan di tahun mendatang.

Tentu, tantangan yang datang di tahun depan akan lebih beragam. Mari, kita songsong tahun 2026 dengan tekad lebih membara guna menjaga ketersediaan BBM dan gas bumi di bumi tercinta ini.

hilir migas

CONTENTS

Edisi 4 | 2025



6
UTAMA
Jelang Nataru 2025/2026,
BPH Migas Pastikan Ketersediaan BBM dan Gas Bumi Terjaga

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan pasokan dan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan, maupun gas bumi menyongsong libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi aman dan terjaga.

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kirimkan ke:
Redaksi Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS
Jl. Kapten P. Tendean No. 28
Jakarta Selatan, Indonesia
12710

e-mail : **komunikasi@bphmigas.go.id**
Telp. : **+62-21 5255500, 5212400**
Fax. : **+62-21 5223210, 5255656**

46
REVIEW BUKU
Animal Farm







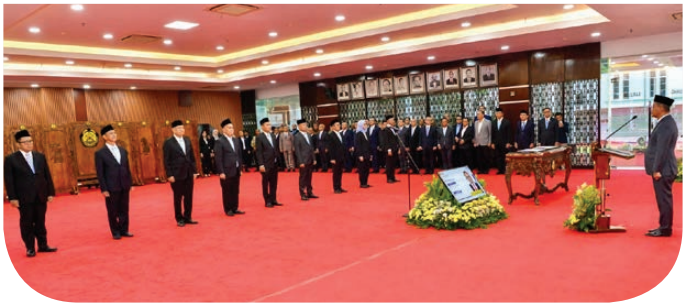
8
UTAMA
BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Cukupi Kebutuhan Masyarakat Selama Libur Nataru 2025/2026

LENSA

10-45

- Gunakan CCTV, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Perkuat Pengawasan BBM Subsidi
- Konsolidasi Data Dukung Efisiensi Pemanfaatan BBM Kereta Api
- BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Banten Tingkatkan Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi
- BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat Bentuk Tim Khusus Awasi Penyaluran BBM Subsidi
- BPH Migas Jaga Ketersediaan BBM Wilayah Bali
- Integrasi Aplikasi XSTAR-KUSUKA Permudah Nelayan Akses BBM Subsidi
- Junjung Transparansi dan Akuntabilitas, BPH Migas Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan PNBP
- Dukung Swasembada Energi, BPH Migas Gelar Forum Komunikasi Hilir Migas
- Gas Bumi Penopang Utama Perekonomian Nasional
- Sub Penyalur Jadi Solusi Ketersediaan BBM di Pelosok
- Hari Jadi Pertambangan dan Energi BPH Migas Ajak Generasi Muda Teladani Tokoh Energi
- Logo Baru BPH Migas Pancarkan Semangat Baru untuk Energi Negeri
- BPH Migas Terus Kawal Pemanfaatan BBM Subsidi untuk Kapal Penumpang
- Pemerintah Pastikan Kualitas Pertalite di Jawa Timur
- Rangkul *Stakeholder*, BPH Migas Perketat Penyaluran BBM Subsidi
- BPH Migas Pantau Pasokan BBM Wilayah Papua Jelang Nataru
- Menteri ESDM Lantik Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2025-2029
- Gelar Sertijab, Semangat Baru BPH Migas Menuju Tata Kelola Hilir Migas yang Lebih Baik
- BPH Migas Apresiasi Pemangku Kepentingan Hilir Migas 2025
- BPH Migas Perkuat Tata Kelola Hilir Migas untuk Wujudkan Swasembada Energi Nasional





Jelang Nataru 2025/2026, BPH Migas Pastikan Ketersediaan BBM dan Gas Bumi Terjaga

Oleh: Ajipamuji Awaludin
Penata Layanan Operasional BPH Migas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan pasokan dan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan, maupun gas bumi menyongsong libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi aman dan terjaga.





Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025).

Wahyudi memaparkan, BPH Migas telah menetapkan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Minyak Tanah sebesar 520.039 KL, di mana atas realisasi dan prognosa akhir tahun penyerapan 96,33% atas kuota nasional yang ditetapkan sebesar 525.000 KL. Sedangkan untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Minyak Solar, kuota nasional sebesar 18.885 juta KL di mana BPH Migas telah mengalokasikan sebesar 18.699.775 KL dengan potensi penyerapan sampai akhir tahun sebesar 97,12%.

"Dengan kondisi ini, *insya Allah* minyak solar dan minyak tanah cukup aman sampai dengan akhir tahun. BPH Migas telah melakukan penyesuaian kuota untuk masing-masing kota. Jika ada lonjakan khusus kebutuhan BBM, PT Pertamina Patra Niaga akan melakukan penyesuaian



agar masyarakat tidak merasa terganggu," tegasnya.

Selanjutnya, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/ Pertalite), BPH Migas telah menetapkan kuota nasional sebesar 31.230.017 KL dan dialokasikan sebesar 31.130.017 K yang berarti potensi realisasi hingga akhir tahun sebesar 89,92%.

"Artinya akan lebih rendah dari kuota yang ditetapkan BPH Migas dan ada *saving* yang belum dialokasikan untuk di tingkat wilayah kabupaten/ kota. Nanti digunakan akan menjadikan relaksasi pada kondisi akhir tahun, sesuai dengan koordinasi dengan Pertamina Patra. Fleksibilitas tetap diberikan kepada Pertamina karena nanti pergerakan masyarakat sulit untuk diprediksi, terutama untuk daerah-daerah destinasi maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga menyampaikan bahwa untuk mendorong pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, BPH Migas telah menggunakan Aplikasi XStar yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan bagi sektor perikanan, pertanian, UMKM, layanan umum serta perkebunan rakyat.

> "Dengan surat rekomendasi ini, masyarakat tidak perlu membawa peralatannya ke SPBU. BBM subsidi dapat dibeli dengan surat rekomendasi dan menggunakan jenis-jenis jerigen maupun tangki yang memenuhi standar keselamatan migas."
>
> **Wahyudi Anas**
> Kepala BPH Migas

Dalam diskusi dengan Komisi XII DPR RI tersebut juga dibahas mengenai rencana kegiatan Posko Nasional sektor BBM di mana BPH Migas sebelumnya 3 tahun sebagai ketua posko di mana kegiatannya rencananya akan dimulai 19 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengharapkan kunjungan kerja ini dapat menghasilkan masukan guna memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi energi nasional khususnya pada periode Nataru 2025/2026.

"Kesiapan pasokan, kelancaran distribusi serta jaminan mutu BBM akan menjadi faktor yang menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan energi," ujar Ratna.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi XII Sigit Karyawan Yunianto, Cek Hendra, Dewi Yustisiana, A. Junaidi Auly, Meitri Citra Wardani, Aqib Ardiansyah, Mulyadi, dan Dipo Nusantara Pua Upa, Plt Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, dan perwakilan badan usaha.



BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Cukupi Kebutuhan Masyarakat Selama Libur Nataru 2025/2026

Tidak terasa libur panjang perayaan Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 akan segera mengisi kegiatan masyarakat Indonesia di penghujung akhir tahun. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama-sama dengan *stakeholder* bersiap siaga untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang menjalani ibadah Natal atau sekadar menikmati libur di destinasi wisata.

Dalam Kunjungan Kerja Panja Migas Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Bali, Jumat (14/11/2025), Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan semangat kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada periode Nataru tahun ini tersedia bagi masyarakat.

"Perlu kami sampikan dalam hal kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) nanti semangat kita bersama-sama dengan Pertamina Group telah menyusun program *monitoring* untuk Nataru," ungkap Wahyudi.

Lebih lanjut, Wahyudi menegaskan pihaknya telah menetapkan alokasi ketersediaan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Tanah dan Biosolar serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite terhitung di bawah ketetapan kuota nasional hingga akhir tahun.

Wahyudi menambahkan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM



> *Insha Allah* sampai dengan akhir tahun nanti prognosa kami untuk JBT dan JBKP masih di bawah dari ketetapan kuota BPH Migas secara nasional."

Wahyudi Anas
Kepala BPH Migas



senantiasa dicatat, diawasi, dan dievaluasi sebagai komitmen pemerintah dalam menyiapkan pasokan BBM selama periode libur Nataru.

"Semuanya akan kita *update* dan kita monitor termasuk daerah-daerah yang rawan bencana, destinasi masyarakat untuk libur Nataru, dan objek-objek wisata akan menjadi perhatian kita bersama *stakeholder*," ujarnya.

Sebagai informasi, BPH Migas bersama dengan *stakeholder* memantau ketersediaan dan pendistribusian sektor energi (BBM, gas bumi, kelistrikan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan kebencanaan geologi) dalam kegiatan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.



Gunakan CCTV, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Perkuat Pengawasan BBM Subsidi



Pengawsan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bisa diperketat melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan *Closed-Circuit Television* (CCTV).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun menyadari kegunaan CCTV terhadap pengawasan BBM subsidi. Hal tersebut tercermin dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga tentang Pemberian Akses CCTV di penyalur BBM oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan kepada BPH



Migas. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/BBM Kompensasi) semakin tepat sasaran dan tepat volume.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Erika menjelaskan, akses CCTV ini memungkinkan proses distribusi dipantau secara *real time*. Gambar atau video dari CCTV berpotensi memuat data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sehingga perjanjian antar Pengendali Data diperlukan untuk memastikan batasan yang jelas terkait maksud, tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

"Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengingat terdapat tujuan yang saling berkaitan dalam pemantauan atas penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di seluruh wilayah NKRI agar tepat sasaran dan tepat volume," ujarnya.

Selama ini, lanjut Erika, PT Pertamina Patra Niaga telah menerapkan sistem teknologi informasi terpadu secara bertahap dan berkesinambungan untuk merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM subsidi. Penerapan tersebut sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM/2022 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2023-2027 dan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/2022 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBKP Tahun 2023-2027.

"Salah satu *tools* (instrumen) pengawasan yang meng-gunakan sistem teknologi informasi dalam penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP adalah CCTV yang dapat merekam dan menampilkan gambar atau video aktivitas penyaluran JBT dan JBKP di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," jelasnya.

Tahap awal, implementasi kerja sama ini akan dilakukan di SPBU wilayah Sumatera Barat sebelum nantinya diperluas ke daerah lain secara bertahap. Dengan adanya akses CCTV ini, diharapkan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kita berharap bisa memantau atau memonitor dari kantor BPH Migas. Apabila terjadi atau kita curigai ada hal-hal yang diindikasikan penyelewengan, barulah kita akan mendatangi lokasi," terangnya.

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra.



Ilustrasi. Foto: hstim.ewa

Konsolidasi Data Dukung Efisiensi Pemanfaatan BBM Kereta Api

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memanfaatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk sektor perkeretaapian. Meski begitu, konsolidasi data yang lebih kuat antara BPH Migas dan KAI diperlukan untuk memastikan jumlah kebutuhan BBM subsidi sesuai kondisi riil di lapangan.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BPH Migas bersama KAI terkait penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume tahun 2025 di Garut, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).

Menurut Erika, sesuai tugas dan fungsi, BPH Migas memiliki amanat untuk melakukan pengaturan serta pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi maupun BBM kompensasi. Salah satunya dengan menetapkan kuota BBM subsidi untuk konsumen pengguna, termasuk sektor perkeretaapian sebagai transportasi khusus.





> BPH Migas melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat volume. Saat ini sudah mendekati triwulan keempat, jadi kami bersama-sama menghitung kebutuhannya. Juga mengevaluasi penyaluran BBM subsidi oleh KAI selama 2024 hingga pertengahan 2025."
>
> **Erika Retnowati**
> Kepala BPH Migas

Dari hasil evaluasi, KAI dinilai sudah memanfaatkan BBM subsidi dengan baik. Namun, Erika menilai perlu ada konsolidasi data yang lebih kuat antara BPH Migas dan KAI untuk memastikan jumlah BBM subsidi yang dibutuhkan sesuai kondisi riil di lapangan.

Penggunaan BBM subsidi oleh KAI terbagi dalam beberapa layanan, mulai dari kereta penumpang, kereta petikemas, kereta parcel, kereta semen, hingga kereta klinker. Ragam kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan setiap tahunnya.

Rakor juga membahas perlunya perencanaan tambahan kebutuhan BBM subsidi oleh KAI. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah yang akan mengalihkan sebagian angkutan logistik darat yang melebihi batas muatan ke moda transportasi kereta api. Perencanaan yang baik dan langkah efisiensi dalam pemanfaatan BBM subsidi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga standar operasional agar layanan kereta tetap prima, aman, serta terjangkau melalui skema *Public Service Obligation* (PSO).

"KAI mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali karena tanpa adanya dukungan BPH Migas untuk menyalurkan BBM subsidi kepada kami, tidak mungkin KAI dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik," ujarnya.

Selain rakor, kegiatan juga dilanjutkan dengan *monitoring* lapangan di Stasiun Kereta Api Garut. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung implementasi pemanfaatan BBM subsidi pada operasional KAI.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas, serta Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Banten Tingkatkan Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Gubernur Banten Andra Soni menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Banten di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, kerja sama ini merupakan PKS ke-22 yang ditandatangani BPH Migas bersama pemerintah provinsi di Indonesia. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat strategis untuk memastikan distribusi JBT/BBM subsidi dan JBKP/BBM kompensasi lebih tepat sasaran.

"Wilayah pengawasan kami mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara jumlah pegawai yang menangani pengawasan terbatas. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah agar distribusi BBM subsidi dan kompensasi bisa lebih efektif, tepat volume, dan tepat sasaran," ujar Erika.

Kerja sama ini sejalan dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemerintah daerah. Selama ini, Pemerintah Daerah berperan besar dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan umum.

"Dengan PKS ini, kami berharap kerja sama yang telah berjalan dapat semakin kuat, khususnya melalui penerapan aplikasi Xstar BPH Migas. Aplikasi ini mempermudah penerbitan Surat Rekomendasi karena sudah dilengkapi formula perhitungan kuota, sehingga tidak perlu lagi dihitung manual. Selain itu, data XStar terintegrasi antara BPH Migas, Pemda, dan Pertamina, sehingga perencanaan kebutuhan BBM ke depan akan lebih akurat," jelasnya.

Erika menambahkan, implementasi aplikasi XStar akan membantu pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. "Dengan data yang seragam dan transparan, kita bisa mengukur kebutuhan lebih presisi, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Provinsi Banten Andra Soni menyambut baik kerja sama ini. Kehadiran PKS Provinsi Banten dengan BPH Migas sangat bermanfaat bagi masyarakat Banten, terutama untuk sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada BBM.

Kegiatan penandatanganan PKS ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, dan Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.





BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat Bentuk Tim Khusus Awasi Penyaluran BBM Subsidi



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berencana membentuk tim khusus guna mengawasi penyaluran Bahan Bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi.

Rencana tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT/subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/kompensasi) pada Konsumen Pengguna Tertentu di Pontianak, Rabu (27/8/2025).

Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar pada 17 Oktober 2024. PKS tersebut berisi pengendalian serta pengawasan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Kalbar.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengawal distribusi BBM subsidi.

"Rapat koordinasi membahas pengawasan pendistribusian BBM subsidi maupun kompensasi, dengan melibatkan stakeholder. Satuan Tugas (satgas) pengendalian dan pengawasan BBM subsidi yang dibentuk ini akan diimplementasikan secara masif dan tentunya diharapkan dukungan masyarakat dalam pengawasannya," ujarnya.

Selain pengawasan, rapat juga membahas langkah menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis. Potensi hambatan, seperti pendangkalan alur distribusi BBM di Sungai Kapuas, menjadi salah satu isu yang perlu diantisipasi.

"Rakor juga membicarakan masalah penyaluran atau pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna, tidak hanya kendaraan bermotor dan angkutan barang. Pemerataan pendistribusian BBM untuk konsumen yang berhak harus dibahas bersama, demikian pula pengawasannya," tambahnya.

Sinergi lintas sektor juga penting untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatan BBM subsidi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya transportasi dan usaha produktif. Halim optimistis melalui kolaborasi seluruh pihak, tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.

BPH Migas Jaga Ketersediaan BBM Wilayah Bali



Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu destinasi andalan Indonesia. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun bertekad menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sektor transportasi darat, laut maupun udara di Pulau Dewata.

Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra saat melakukan pemantauan ke *Integrated Terminal* (IT) Manggis, Karangasem, Bali, Kamis (28/8/2025).



Kelancaran pasokan BBM berperan penting untuk mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. BPH Migas terus melakukan *monitoring* agar ketersedian BBM memadai dan seluruh kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Bali ini menjadi destinasi wisata internasional dan sudah mendunia, sehingga *support* daripada kebutuhan energi, di antaranya BBM maupun aviasi harus betul-betul tersedia dengan baik," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini.

Selain ketersediaan pasokan, BPH Migas juga memberi perhatian pada kesiapan sarana distribusi. Tiko menekankan pentingnya memastikan armada mobil tangki dan awak mobil tangki dalam kondisi terbaik agar distribusi energi tidak terganggu.

"Kami juga ingin mengecek operasional mobil tangki sebagai alat distribusi BBM kepada lembaga penyalur. Ini harus betul-betul dipastikan, kondisi mobil tangki dan awak mobil tangki dalam keadaan sebaik-baiknya," tuturnya.

BPH Migas juga turut memastikan agar produk BBM yang beredar wajib sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. "Selanjutnya, bagian dari rantai pasok ini adalah produk. Tentu menjadi tugas dan tanggung jawab BPH Migas bahwa produk yang dijual kepada konsumen telah memenuhi syarat, ketentuan, dan spesifikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah," ucapnya.

Selanjutnya, pada Jumat (29/8/2025), BPH Migas melanjutkan pemantauan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Badung, Bali, untuk mengecek penyaluran BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan melalui Surat Rekomendasi. Tiko menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah bila ditemukan ketidaksesuaian dokumen Surat Rekomendasi.

"Pihak penyalur harus lebih hati-hati, jangan sampai memberikan kuota BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penyalur harus melaporkan kepada dinas terkait apabila terdapat konsumen pengguna yang surat rekomendasinya tidak sesuai," terang Tiko.

Selain meninjau SPBUN, BPH Migas juga menyambangi Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai di Badung. Tiko menilai ketersediaan avtur di Bali dalam kondisi baik dan perlu terus dijaga untuk mendukung layanan penerbangan.

> "Kondisi pasokan dan penyaluran avtur di AFT Ngurah Rai ini sudah berjalan cukup baik, dan yang penting, operasional di sini harus tetap kondusif agar tetap dapat memberikan pelayanan penerbangan bagi masyarakat di Bali."
>
> **Basuki Trikora Putra**
> Anggota Komite BPH Migas

Dalam kesempatan ini BPH Migas juga melakukan monitoring hasil uji coba pelaksanaan *Sustainable Aviation Fuel,* yang merupakan campuran avtur dan 2,5% *Used Cooking Oil* (UCO), oleh maskapai Pelita Air dengan rute penerbangan Jakarta – Bali. Tiko mengungkapkan bahwa hal ini menunjukkan komitmen indonesia dalam transisi energi bersih dan pengurangan emisi gas buang.





Integrasi Aplikasi XSTAR-KUSUKA Permudah Nelayan Akses BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki aplikasi XSTAR. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung KUSUKA. Kedua aplikasi itu akan diintegrasikan. Tujuannya untuk mempermudah nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi.

Upaya yang difasilitasi dan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini akan memperkuat basis data pendistribusian BBM bagi masyarakat pesisir.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan digitalisasi menjadi kunci dalam mendukung nelayan mengakses BBM subsidi secara lebih cepat dan akurat.

"Digitalisasi adalah salah satu langkah menuju kepada pengembangan sistem untuk mempermudah konsumen pengguna, dalam hal ini nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi melalui surat rekomendasi," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Infrastruktur Integrasi Data BBM Nelayan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025).

Halim menjelaskan, integrasi data BPH Migas dan KKP akan menjamin validitas data yang diterima Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi. Dengan begitu, distribusi BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran.

"Gunanya integrasi data dan pengembangan sistem ini adalah memastikan BBM subsidi dan kompensasi yang dikonsumsi oleh nelayan, benar-benar dipakai untuk melaut. Jangan sampai disalahgunakan," tegasnya.

Data nelayan yang tercatat pada KUSUKA akan diolah dalam aplikasi XSTAR BPH Migas sebagai salah satu persyaratan pengajuan Surat Rekomendasi di daerah. Hal ini memperkuat proses verifikasi sebelum QR Code XSTAR bisa digunakan nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

"Ini tidak hanya sekadar pertukaran data atau penyimpanan data, tetapi verifikasi data. Data yang masuk ke sistem adalah data yang valid. Sehingga, dapat dipergunakan untuk menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi kepada nelayan yang berhak," jelasnya.

Program integrasi XSTAR dan KUSUKA rencananya akan diluncurkan di Cirebon, Jawa Barat, karena tingkat penggunaan aplikasi XSTAR di wilayah Cirebon yang sudah mencapai 100%. Selanjutnya, integrasi akan diperluas ke daerah lain di Indonesia. Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha terkait.

Junjung Transparansi dan Akuntabilitas, BPH Migas Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan PNBP

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen menjunjung akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola hilir migas. Komitmen ini disampaikan kepada berbagai pihak melalui sejumlah kesempatan.



Salah satunya saat BPH Migas menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini merupakan salah satu wujud komitmen mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola hilir migas.

Dalam acara sosialisasi yang dihadiri perwakilan badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan, pemeriksaan PNBP bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

"Memastikan bahwa wajib bayar telah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran PNBP, dalam hal ini khususnya iuran BPH Migas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya, di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut Erika, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan kepada badan usaha terkait pemenuhan kewajiban iuran maupun kepatuhan terhadap regulasi di bidang PNBP.

Sejak tahun 2022, pemeriksaan telah berjalan dan hingga kini sekitar 30 badan usaha telah diperiksa. Pemilihan badan usaha yang diperiksa dilakukan dengan sejumlah kriteria, seperti adanya transaksi yang belum dilaporkan dalam laporan kegiatan bulanan, transaksi dengan agen, serta adanya selisih antara nilai penjualan yang dilaporkan ke BPH Migas dengan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Saat ini BPH Migas telah melakukan kerja sama pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PRJ-7/PJ/2024 dan Nomor 2/Pj/PKS.01/BPH/2024 tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara," imbuh Erika.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan pentingnya dukungan badan usaha dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. "Prosedur pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada badan usaha. Jika ada kekhilafan pencatatan, diharapkan ke depan sudah tidak terjadi lagi. Kalau sama-sama taat, *insya Allah* kompetisi di pasar juga sama-sama sehat," ujarnya.

Dukung Swasembada Energi, BPH Migas Gelar Forum Komunikasi Hilir Migas

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencapai swasembada energi sebagaimana yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Forum Komunikasi Hilir Migas di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/9/2025).



Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon ketika membuka acara tersebut menyampaikan, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan gas bumi melalui pipa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amanat ini harus dijunjung tinggi dan dalam pelaksanaannya, BPH Migas berkolaborasi dengan berbagai pihak agar kebijakan di sektor hilir migas dapat disampaikan dan dijalankan dengan baik.

> “Pemerintah dan badan usaha harus memiliki visi dan bahasa yang sama dalam menyikapi suatu kebijakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar.”
>
> **Patuan Alfon**
> Sekretaris BPH Migas

Alfon melanjutkan, era digital membawa peluang dan tantangan yang unik. Informasi positif dapat tersebar luas hanya dalam sesaat. Di sisi lain, kita juga berada di era pasca-kebenaran atau *Post-Truth*, di mana faktor perasaan dan keyakinan mengalahkan unsur





fakta yang objektif. Oleh karena itu, saat isu negatif muncul di ruang publik, respons cepat dan tepat sangat menentukan persepsi publik terhadap institusi.

"Pengelola komunikasi publik hendaknya dapat memanfaatkan kecepatan ini untuk menyampaikan narasi yang benar, sebelum berkembang lebih jauh menjadi krisis," tambahnya.

Forum Komunikasi Hilir Migas mengangkat tema "Komunikasi Publik Sektor ESDM: Strategi Publikasi dan Mitigasi Isu Publik di Sektor Energi dan Hilir Migas". Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola komunikasi dan kehumasan di lingkungan Kementerian ESDM dan badan usaha hilir migas.

Dalam sesi diskusi, tampil sebagai pembicara adalah Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik dan Media Dwi Anggia dan Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad.

Dwi Anggia menyampaikan paparan mengenai strategi komunikasi publik dan mitigasi isu publik di sektor energi dan hilir migas Kementerian ESDM. Menurutnya, sektor energi merupakan sektor yang 'seksi' karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Sebagian isunya sensitif, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam membuat kebijakan maupun pelaksanaannya.

Pada era digital ini, lanjutnya, semua orang dapat menerima berbagai informasi. Mulai dari berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hingga berita bohong atau hoaks. Menghadapi situasi ini, Humas dituntut menyampaikan pesan atau narasi kunci sesuai dengan audiens, serta jelas dan terperinci.

"Segmentasi audiens harus jelas. Ada stakeholder, badan usaha, masyarakat langsung, juga publik yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian," tambahnya.

Narasi yang disampaikan harus jelas dan terperinci,







serta membuka peluang untuk berinteraksi dengan audiens. "Kita harus punya *grand narative* atau narasi besar. Dan pesan kunci yang akan disampaikan ke publik, harus dipastikan sudah tercerminkan dalam setiap pesan yang akan disampaikan ke publik," paparnya.

Anggi menekankan pentingnya mengetahui kebijakan editorial dari suatu media, baik media massa maupun media sosial. Media bekerja berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pihak tertentu ataupun institusi.

"Sementara itu, Humas suatu institusi atau badan usaha, harus menjaga kepentingan lembaganya. Semua aksi institusi akan mendapat sorotan media, termasuk juga gestur pemimpinnya," ungkapnya.

Anggi juga meminta agar humas tidak takut mengatasi krisis. Untuk mengatasi situasi '*chaos*', jangan hanya mengandalkan siaran pers semata, melainkan juga mengaktifkan media sosial. "Jangan takut menghadapi krisis. Kita harus cepat bertindak, bahkan lebih cepat dari angin kalau bisa. Tapi tentunya dengan fakta yang sudah benar-benar *verified*," imbuhnya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah peran *media monitoring* untuk mengetahui isu yang berkembang di masyarakat, serta koordinasi dan komunikasi yang baik antara regulator dan *stakeholder* agar narasi yang disampaikan ke masyarakat sama atau selaras sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam kesempatan yang sama, Arifin Asydhad memaparkan materi mengenai cara media membingkai berita sektor energi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perhatian khusus pada sektor energi dan menjadikan swasembada energi sebagai bagian dari Program Astacita.

Menurutnya, pembahasan yang menarik perhatian Presiden, antara lain mengenai 100% listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam 10 tahun, *waste to energy*, pembangunan kilang, pengembangan bio energi, pengurangan impor bahan bakar, dan peningkatan produksi migas.

Penyampaian pandangan Presiden mengenai energi, lanjut Arifin, merupakan momentum bagi Kementerian dan badan usaha sektor energi untuk meningkatkan pemberitaan mengenai hal tersebut. Di sisi lain, regulator dan badan usaha perlu melakukan sosialisasi mengenai energi agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik.

"Pada saat Presiden Prabowo menyampaikan soal energi, pada saat itulah media masaa juga akhirnya ikut memberitakan. Ini menjadi momentum penting dan Humas perlu melakukan edukasi publik agar tidak salah paham, mengingat sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai energi," ucapnya.

Pemberitaan mengenai hilir energi yang menarik perhatian masyarakat dan media massa, antara lain ketersediaan BBM, subsidi energi, LPG 3 kg, tarif listrik dan harga gas untuk industri.

Menurut Arifin, media mainstream berperan penting dalam isu energi. Melalui *agenda setting*, media dapat menentukan fokus isu, membentuk opini dan persepsi publik, dan membuat informasi lebih mudah diterima. "Selain itu, jangkauan lebih luas lewat konsep *multichannel journalism*, dan mendorong isu tertentu lewat *event*," tambahnya.

Mengakhiri paparannya, Arifin meminta agar Humas dapat segera menanggapi atau merespon suatu isu di media, baik media massa maupun media sosial. Juga, menciptakan kreativitas dalam membangun komunikasi dengan media dan masyarakat.

Gas Bumi Penopang Utama Perekonomian Nasional



Gas bumi tidak hanya berperan sebagai energi transisi yang lebih bersih, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian nasional. Tak berlebihan bila gas bumi dinilai memiliki peran strategis sebagai pilar swasembada energi nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam Forum Group Discussion (FGD) BPH Migas bersama PT PGN di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (26/9/2025).

Pemanfaatan gas bumi selaras dengan prioritas nasional kedua dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prioritas ini menekankan penguatan sistem pertahanan sekaligus kemandirian bangsa melalui swasembada energi, pangan, air, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif.

"Gas bumi tidak hanya berperan sebagai energi transisi yang lebih bersih, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian nasional, mulai dari mendukung sektor industri, kelistrikan, hingga rumah tangga. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," ungkapnya.

Erika menekankan pentingnya sinergi dengan PGN dan seluruh badan usaha terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas. Diskusi yang digelar kali ini juga membahas terkait pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di berbagai wilayah.

"Semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan tata kelola hilir migas yang transparan, adil, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan energi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan jargas. Menurutnya, jargas tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga menjadi bagian dari transisi energi bersih di Indonesia.

"Kami mendorong agar pemanfaatan Jaringan gas dengan sistem klaster Compressed Natural Gas (CNG) bisa lebih efektif dan menjangkau masyarakat luas di wilayah Sleman dan Yogyakarta sekitarnya, kami berharap jargas dapat menjadi solusi energi yang efisien, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga, pelanggan kecil, maupun industri," ujarnya.

Selain FGD, BPH Migas juga melakukan pemantauan lapangan, yakni di Truntum Gasblock Borobudur dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (25/9/2025). Kunjungan juga dilakukan di Pressure Regulating Station (PRS) Yogyakarta di Sleman, Jumat (26/9/2025). Menurut Wahyudi, langkah ini untuk memastikan pemanfaatan jargas berjalan optimal sekaligus memperluas akses gas bumi bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra.

Sub Penyalur Jadi Solusi Ketersediaan BBM di Pelosok

Keberadaan sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Solusi terhadap ketersediaan BBM bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, atau Terpencil. Pasalnya, sub penyalur mampu menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki penyalur resmi.



Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di daerah yang belum memungkinkan dibangunnya penyalur.

"Kita harus memahami bahwa belum semua kecamatan bisa dibangun penyalur BBM. Sub penyalur adalah salah satu solusi yang







diberikan Pemerintah, khususnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), agar masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan yang belum terdapat penyalur, bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tepat sasaran," ungkap Erika dalam Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (19/9/2025).

Erika menjelaskan, sub penyalur merupakan perwakilan dari kelompok konsumen di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Terpencil yang ditunjuk untuk mengelola BBM sesuai kriteria yang ditetapkan BPH Migas. Mekanisme ini, tegasnya, bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan menjamin akses energi.

"Sub penyalur bisa mewakili kelompoknya baik di kelompok nelayan, petani, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan juga pengguna transportasi darat untuk bisa mengambilkan BBM ke penyalur terdekat dan kemudian didistribusikan kepada kelompoknya," tambahnya.

Lebih lanjut, Erika menekankan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Jarak antarpenyalur yang berjauhan membuat masyarakat di wilayah terpencil kesulitan memperoleh BBM. "Kami melihat sendiri di Bintan ini cukup jauh jarak antara satu penyalur dengan penyalur lainnya. Sehingga di daerah-daerah yang tidak ada penyalur itu memang dibutuhkan penyediaan BBM dengan mekanisme lain. Jadi sub penyalur ini adalah salah satu solusi bagaimana masyarakat itu dapat mendapatkan BBM dengan mudah, tanpa harus bersusah payah pergi ke satu tempat yang cukup jauh," jelasnya.

Payung hukum mengenai sub penyalur tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Sub Penyalur di Daerah 3T. Selanjutnya, BPH Migas menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 yang memperpanjang masa transisi penyaluran JBT dan/atau JBKP melalui sub penyalur, dari semula Februari 2025 menjadi 30 September 2025.

Acara sosialisasi ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim. Sehari sebelumnya, Kamis (18/9/2025), BPH Migas telah melakukan kunjungan lapangan ke calon sub penyalur di Kabupaten Bintan. Dalam kesempatan itu, Abdul Halim menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan BPH Migas No 1 Tahun 2024, dan juga mempertimbangan keamanan dan keselamatan. Berdasarkan hasil tinjauan, sebagian calon sub penyalur masih belum memenuhi persyaratan teknis, khususnya dari sisi keselamatan.

"Kita meminta mereka (calon sub penyalur), kalaupun nanti menjadi sub penyalur, ketentuan-ketentuan harus diikuti. Ini penting agar nantinya subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, disalurkan kepada masyarakat pengguna yang betul-betul membutuhkannya dengan aman dan lancar," katanya.



80 Hari Jadi Pertambangan dan Energi

BPH Migas Ajak Generasi Muda Teladani Tokoh Energi

Dalam rangka peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mendorong generasi muda meneladani semangat para tokoh di sektor energi. Lebih jauh, generasi muda harus memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan energi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Erika saat memimpin upacara tabur bunga di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Peringatan Hari Jadi ke-80 Pertambangan dan Energi memang diwarnai dengan upacara tabur bunga di sejumlah makam tokoh bangsa yang telah mempersembahkan pengabdian luar biasa bagi bangsa Indonesia, terutama dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

Upacara tabur bunga dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta.



Di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta sendiri, terdapat makam salah satu tokoh pertambangan Indonesia, yaitu almarhum Chaerul Saleh.

"Fokus utama kita saat ini meliputi peningkatan *lifting* migas, percepatan hilirisasi, pengembangan EBT (energi baru terbarukan), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt, serta pemerataan akses listrik melalui listrik perdesaan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," katanya.

Erika juga mengingatkan bahwa seluruh upaya Kementerian ESDM sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kedaulatan energi. Semangat perjuangan para pahlawan energi menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman.

"Seluruh upaya ini terinspirasi dari semangat para pahlawan yang telah berjuang untuk menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat di bidang energi," ujarnya.

Momentum 80 tahun peringatan Pertambangan dan Energi berakar dari peristiwa heroik 28 September 1945, saat sekelompok pemuda mengambil alih kantor Chisitsu Chosasho dari pihak Jepang di Bandung, yang kemudian menjadi cikal bakal Jawatan Tambang dan Geologi.



"Hari ini kita mengenang para tokoh Pertambangan Indonesia yang telah berjasa besar, dan pengorbanannya menjadi teladan bagi kita semua," pungkasnya.

Acara tabur bunga turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Iwan Prasetya Adhi, serta Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S.

Sementara, di TMPNU Kalibata, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra mengikuti upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Menteri ESDM.

Sedangkan di TPU Sasanalaya, Yogyakarta, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman memberikan penghormatan bagi pahlawan Arie Frederik Lasut. Upacara tabur bunga di TPU Sasanalaya dipimpin oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid.

Logo Baru BPH Migas Pancarkan Semangat Baru untuk Energi Negeri

Logo baru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi hadir. Tak sekadar identitas kelembagaan, logo baru BPH Migas memancarkan semangat baru dalam menghadapi tantangan zaman.

Melalui wajah barunya, BPH Migas ingin lebih transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi logo baru BPH Migas yang menurutnya mencerminkan motivasi kerja, kebersamaan, profesionalisme, dan kerja sama.

"Logo ini tidak hanya diartikan sebagai bagian sebuah hasil sayembara karya seniman, tapi pasti memiliki makna-makna lain dari sekedar melakukan penggantian yang sifatnya simbolis. BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk mendorong BBM Satu Harga," paparnya dalam peresmian logo baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10/2025).



Bahlil menekankan pentingnya keberpihakan pada konsumen kecil, khususnya nelayan. Ia menegaskan, subsidi yang kurang atau kuota yang terbatas harus diprioritaskan untuk nelayan.

> “Logo ini tidak hanya diartikan sebagai bagian sebuah hasil sayembara karya seniman, tapi pasti memiliki makna-makna lain dari sekadar melakukan penggantian yang sifatnya simbolis. BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk mendorong BBM Satu Harga.”
>
> **Bahlil Lahadalia**
> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

“Untuk nelayan diprioritaskan karena mereka adalah pendorong ekonomi keluarga, daerah, nasional dan ini adalah bagian daripada pemberdayaan,” ujarnya.

Bahlil juga mendorong peningkatan pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) yang pembangunannya dapat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) atau menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan gas ini maka kita mampu mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan dengan gas ini harga bisa terjangkau. Perbedaannya cukup signifikan, bisa 50% lebih efisien daripada memakai LPG,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, proses penetapan logo baru ini dilakukan melalui perjalanan panjang. Penjaringan desain melalui sayembara terbuka dimulai sejak Oktober 2024 dengan melibatkan 882 peserta, dan pemenang ditetapkan pada 2 Desember 2024.

“Setelah melalui proses kurasi yang ketat, terpilih lima karya terbaik sebagai finalis. Selanjutnya, Tim Panelis dan Dewan Juri yang terdiri dari ahli desain, praktisi *branding*, akademisi, serta perwakilan Komite BPH Migas melakukan proses penilaian secara objektif dan transparan,” katanya.

Logo baru BPH Migas menggantikan identitas lama yang telah digunakan sejak tahun 2003 atau hampir 22 tahun.

Elemen logo baru BPH Migas terdiri dari gambar tetesan minyak, bintang, pendaran bintang, dan garis merah. Sementara filosofi kelima warna menciptakan harmoni antara kredibilitas, keterbukaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan ketegasan. Dalam satu simbol, logo BPH Migas mencerminkan citra BPH Migas yang profesional, transparan, berwawasan lingkungan, dan ketegasan dalam mengawal kebijakan di bidang hilir minyak dan gas bumi melalui pipa.



BPH Migas Terus Kawal Pemanfaatan BBM Subsidi untuk Kapal Penumpang

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kapal penumpang.

Upaya ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim saat melakukan kunjungan ke galangan kapal PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025).





"Kunjungan kerja ini untuk memastikan penyaluran BBM subsidi atau solar yang diberikan Pemerintah kepada konsumen pengguna yaitu kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk penumpang," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, BPH Migas melakukan inspeksi langsung ke kapal penumpang milik PT Pelni. Inspeksi lapangan dilakukan sehubungan penggunaan BBM subsidi yang telah disalurkan ke Kapal Penumpang KM. Umsini dan belum dipergunakan secara keseluruhan. BBM subsidi yang tersisa harus dipindahkan untuk menjaga faktor keamanaan dan keselamatan selama menjalani perbaikan di PT PAL Surabaya.

Halim menegaskan, proses pemindahan BBM subsidi tidak bisa dilakukan begitu saja. Semua prosedur harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta melibatkan pengawasan ketat dari pihak berwenang, termasuk Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, dan Surveyor terakreditasi.

"Nanti akan ada proses untuk mengawasi dan mengontrol perjalanan atau pemindahan BBM subsidi ini ke kapal penumpang lainnya," pungkasnya.

Langkah ini diambil demi memastikan manfaat BBM subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas melalui layanan transportasi laut. BPH Migas berharap langkah-langkah pengawasan terpadu ini dapat menjaga keberlangsungan operasional kapal penumpang serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.





Pemerintah Pastikan Kualitas Pertalite di Jawa Timur



Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati turut mendamping Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memeriksa kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).

Dalam pengecekan tersebut, hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kualitas BBM jenis Pertalite di lokasi tersebut berada dalam kondisi baik. Hasil ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang sempat muncul beberapa waktu terakhir.

Bahlil menyebut bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari langkah cepat Pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat di wilayah Lamongan, Gresik dan Tuban, terkait kendaraan bermotor yang mengalami kendala usai menggunakan BBM Pertalite. Ia menegaskan bahwa Pemerintah akan bersikap transparan terhadap hasil pengecekan di lapangan.

Bahlil menegaskan pentingnya menjaga kualitas BBM sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan energi masyarakat. Ia juga mengingatkan PT Pertamina Patra Niaga agar menjamin kualitas produk yang dijual di lapangan.

Selain mendampingi Menteri ESDM dalam pengujian mutu BBM, Erika Retnowati juga melakukan kunjungan ke Fuel Terminal Malang (FT Malang) untuk memastikan pasokan BBM subsidi dan kompensasi tetap aman. Dalam kunjungan itu, Erika menegaskan pentingnya kesiapan pasokan jelang periode akhir tahun.

"Kita harus bisa memastikan bahwa Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Stok BBM harus tersedia cukup hingga akhir tahun, penyaluran dan distribusinya berjalan lancar," tambahnya.



Rangkul *Stakeholder*, BPH Migas Perketat Penyaluran BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi. Tak sendirian, upaya ini merangkul seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

BBM subsidi dan kompensasi merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Menjaga daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian," ujar Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Mengawal BBM Subsidi melalui Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (8/10/2025).

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara *regulator*, Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat. Menurut pria yang biasa disapa Didit ini, sinergi pelbagai pihak diperlukan mengingat di lapangan masih ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi maupun kompensasi. Penyalahgunaan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

"Tentunya, ini (penyalahgunaan) tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menyebabkan kelangkaan, distribusi BBM subsidi serta kompensasi menjadi tidak tepat sasaran," imbuh Didit, seraya mengungkapkan FGD ini bertujuan untuk menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat diimplementasikan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menjelaskan pentingnya pengawalan distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

"Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap BBM yang digunakan oleh masyarakat. Harus kita kawal, jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini tidak tepat sasaran," ucapnya.

Eman juga menyampaikan bahwa memastikan agar BBM subsidi dan kompensasi digunakan sesuai peruntukannya adalah kewajiban bersama. Pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan dan menjadi salah satu instrumen dalam proses pengawasan.

"Dengan memanfaatkan teknologi, seperti *Closed Circuit Television* (CCTV), penerapan barcode dalam transaksi pembelian BBM Subsidi dan kompensasi, hingga penggunaan aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna," imbuhnya.

Masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat pengawasan, agar penyaluran BBM Subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.

"Kami juga turut serta meningkatkan partisipasi publik dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ini, yaitu melalui aduan masyarakat yang dapat disampaikan di *HelpDesk* BPH Migas," ucapnya.



BPH Migas Pantau Pasokan BBM Wilayah Papua Jelang Nataru

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Papua senantiasa dalam kondisi aman. Tak terkecuali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan bahwa pasokan BBM di wilayah Papua dan Maluku berada dalam kondisi aman.



"Kami sudah melakukan evaluasi di waktu yang berjalan dan kami mendapatkan laporan dari Pertamina Patra Niaga region Papua Maluku, bahwa kita siap untuk mendukung penyediaan dan pendistribusian BBM sampai dengan selesainya kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," ujarnya saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XII DPR RI di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).

Operasional Posko Nasional sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan berjalan secara penuh selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. "Secara umum, untuk kesiapan Nataru, operasional posko diresmikan dari 14 hari sebelum sampai dengan 14 hari setelahnya," imbuh pria yang akrab disapa Tiko ini.

Tiko menekankan, walaupun Posko nasional Sektor ESDM merupakan agenda rutin, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh disepelekan. Konsistensi dan tanggung jawab merupakan kunci suksesnya menjalankan agenda tahunan ini. "Kita berharap, semoga tugas ini dapat berjalan dengan baik. Masyarakat di wilayah Papua dan Maluku dapat mengikuti perayaan hari besar Nataru dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Dalam kesempatan ini, Sugeng Suparwoto selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya mitigasi pasokan energi untuk wilayah timur Indonesia. "Kunjungan Komisi XII ke Papua kali ini mengkhususkan untuk mitigasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua, setidaknya dalam menghadapi Nataru. Khususnya di BBM, gas, dan listrik," ucapnya.

Pada hari Rabu (29/10/2025), BPH Migas melanjutkan kegiatan pengawasan langsung ke sejumlah lokasi di Jayapura, di antaranya Integrated Terminal (IT) Jayapura, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kotaraja, dan SPBU Nelayan (SPBUN) Hamadi. Berdasarkan hasil pemantauan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menerangkan kesiapan pasokan BBM di Papua dalam kondisi lancar.

"Saat ini, tim Pertamina Patra Niaga area Papua Maluku telah menyiapkan untuk kesiaagaan Nataru yang akan datang. *Alhamdulillah*, semua sudah siap dan semoga kegiatan Nataru dapat berjalan lancar," ungkapnya.

Saat meninjau SPBUN, Eman juga mendorong percepatan penerapan digitalisasi Surat Rekomendasi (Surkom) bagi pembelian BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan. Secara umum, Eman menilai bahwa penyaluran BBM di wilayah Papua dan Maluku berjalan tanpa hambatan.





Menteri ESDM Lantik Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2025-2029

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia resmi melantik Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Periode 2025-2029 di Jakarta, Senin (10/11/2025). Bahlil menegaskan pentingnya efisiensi dan pemerataan energi, terutama dalam menjaga ketersediaan BBM di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Komite BPH Migas yang baru dilantik. "Saya ucapkan selamat bergabung, selamat menjalankan tugas dan selamat datang. Saya pikir ke depan menyangkut kedaulatan energi akan menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjalankan tugas kita," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi BPH Migas, khususnya terkait pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penetapan tarif gas bumi melalui pipa.

"Dan saya minta, khusus untuk BPH Migas ini menyangkut dengan BBM bersubsidi, kemudian adalah menyangkut dengan toll fee, kita harus mampu menemukan efisiensi," imbuhnya.

Selain itu, Bahlil juga memberikan instruksi khusus terkait kesiapan ketersediaan BBM menjelang periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menekankan agar BPH Migas memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke wilayah 3T, demi menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Yang sudah bagus silakan dijalankan, yang belum bagus silakan diperbaiki. Terutama untuk menjelang tahun baru, kita harus buat tim yang baik. Untuk menjaga jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menuju Natal dan Tahun Baru, khususnya ketersediaan BBM, kemudian suplai BBM, terutama daerah-daerah 3T," tutupnya.

Adapun Komite BPH Migas Periode 2025-2029 yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Wahyudi Anas (Ketua Komite BPH Migas)
2. Arief Wardono (Anggota Komite BPH Migas)



3. Bambang Hermanto (Anggota Komite BPH Migas)
4. Baskara Agung Wibawa (Anggota Komite BPH Migas)
5. Eman Salman Arief (Anggota Komite BPH Migas)
6. Erika Retnowati (Anggota Komite BPH Migas)
7. Fathul Nugroho (Anggota Komite BPH Migas)
8. Harya Adityawarman (Anggota Komite BPH Migas)
9. Hasbi Anshory (Anggota Komite BPH Migas)

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot, Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya, Komite BPH Migas periode 2021-2025, pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM, serta jajaran direksi badan usaha hilir migas.





Gelar Sertijab,

Semangat Baru BPH Migas Menuju Tata Kelola Hilir Migas yang Lebih Baik





Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2021-2025 kepada Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2025-2029 di Jakarta, Selasa (11/11/2025). Momentum ini menandai babak baru dalam perjalanan BPH Migas untuk memperkuat peran pengaturan dan pengawasan di sektor hilir migas demi ketahanan energi dan berkelanjutan.





Sertijab ditandai dengan penyerahan memori jabatan oleh Ketua Komite BPH Migas/ Kepala BPH Migas Periode 2021-2025 Erika Retnowati kepada Ketua Komite BPH Migas/ Kepala BPH Migas Periode 2025-2029 Wahyudi Anas. Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran pimpinan dan pegawai BPH Migas, serta perwakilan badan usaha di sektor hilir migas.

Dalam sambutannya, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengapresiasi kerja keras Komite Periode 2021-2025 yang telah memperkuat tugas dan fungsi BPH Migas, terutama dalam menjaga kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas bumi melalui pipa. "Terutama terkait pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan, hambatan dan gangguan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi melalui pipa," ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengajak seluruh jajaran BPH Migas untuk melanjutkan semangat kolaborasi dan kerja bersama dalam menjalankan amanah. "Mari kita bersama-sama, bahu-membahu untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi BPH Migas dan satu komitmen memajukan BPH Migas, serta mendukung program-program yang kita siapkan bersama," tuturnya.

Wahyudi juga menekankan pentingnya transformasi internal untuk mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas pegawai. "Ke depan, kita siap melakukan transformasi untuk mendukung kompetensi, memberikan motivasi dan meningkatkan produktivitas guna mendukung kinerja BPH Migas yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite BPH Migas periode 2021-2025 Erika Retnowati menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa jabatannya. Ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan oleh Komite periode berikutnya.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan dilanjutkan oleh Komite yang baru. Antara lain, regulasi mengenai asersi nozzle BBM bersubsidi dan tata kelola minyak tanah, serta tarif 0% untuk gas bumi," ujarnya.

Erika juga menyoroti pentingnya pengembangan teknologi dan sistem informasi dalam mendukung kebijakan energi yang tepat sasaran. "Kita sudah melakukan satu lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) di Batam yang dimenangkan PT PGN. Tentu kita perlu evaluasi pelaksanaannya dan perlu disiapkan lagi untuk lelang-lelang di wilayah lainnya dan penyempurnaannya agar berjalan lancar," ungkapnya.

Erika menambahkan untuk mewujudkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran dan tepat volume, perlu adanya aplikasi yang dapat memantau seluruh SPBU secara real time.

Acara Sertijab turut dihadiri oleh Komite BPH Migas Periode 2021-2025, yaitu Erika Retnowati, Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Aditya Warman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra. Adapun Komite BPH Migas Periode 2025-2029 terdiri atas Wahyudi Anas, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.



BPH Migas Apresiasi Pemangku Kepentingan Hilir Migas 2025

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Pemerintah di bidang bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, termasuk dukungan penyediaan energi di daerah terdampak bencana di Sumatera. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan Doa untuk Negeri di Jakarta, Selasa malam (30/12/2025).

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas peran badan usaha BBM dan gas bumi, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada badan usaha BBM dan gas bumi, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah menunjukkan kepatuhan, kinerja terbaik, dan kontribusi nyata, baik dalam mendukung penerimaan negara, pengembangan infrastruktur energi, maupun pelaksanaan penugasan pemerintah," ungkap Wahyudi Anas dalam sambutannya pada rangkaian peringatan Hari Jadi ke-23 BPH Migas.

Penghargaan ini sekaligus menjadi harapan agar sinergi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha terus diperkuat dalam mewujudkan ketahanan serta kedaulatan energi nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, BPH Migas memberikan penghargaan dalam 15 kategori bidang BBM dan gas bumi kepada 34 penerima. Selain itu, BPH Migas juga memberikan apresiasi atas sinergi badan usaha hilir migas dalam penanggulangan





bencana di Sumatera, termasuk dukungan terhadap penyediaan energi di wilayah terdampak.

Wahyudi menuturkan, tahun 2025 menjadi momentum refleksi bahwa di tengah berbagai capaian kinerja, bangsa Indonesia juga menghadapi ujian berupa bencana alam, khususnya di wilayah Sumatera. Dalam kondisi tersebut, BPH Migas mendukung percepatan pemulihan di daerah terdampak bencana.

Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui kebijakan relaksasi penyaluran BBM, yakni relaksasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tanpa menggunakan *barcode*, serta relaksasi pembelian JBT dan JBKP untuk kendaraan pemerintah dan alat berat yang digunakan dalam penanganan bencana. Relaksasi ini diberikan selama masa tanggap darurat bencana.

Bersama badan usaha, BPH Migas juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak berupa 5.000 paket bantuan di wilayah Aceh Tamiang, Langsa, Pidie, Bireun, Sibolga, Tapanuli, dan Padang. Bantuan meliputi sembako, vitamin dan obat-obatan, pakaian, selimut, handuk, serta hunian sementara bagi pengungsi.

Selain itu, BPH Migas turut mendukung penyediaan infrastruktur dasar melalui pembangunan 66 tenda pengungsian lengkap dengan sumur bor air bersih di Sibolga dan Garoga. Untuk wilayah Tapanuli Tengah, bantuan yang diberikan berupa empat unit genset listrik, tiga unit layanan internet Starlink, serta dua unit reverse osmosis untuk pemurnian air bersih bagi warga terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas juga memberikan apresiasi kepada anak-anak berprestasi serta santunan bagi anak yatim di lingkungan BPH Migas. Acara ditutup dengan tausyiah dan doa bersama yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber.

Selengkapnya penghargaan yang diberikan sebagai berikut:

A. Badan Usaha BBM

1. Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT dan JBKP melalui XSTAR:
   - Provinsi Jawa Tengah
   - Provinsi Jawa Timur
   - Provinsi NTT

2. Apresiasi atas Kepatuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Bulanan:
   - PT Bayu Sinergi
   - PT Justin Bintang Samudera Mandiri
   - PT Cosmic Petroleum Nusantara

3. Apresiasi atas Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Iuran PNBP Bidang BBM:
   - PT Petromine Energy Trading
   - PT Petro Andalan Nusantara
   - PT Bahari Berkah Madani



4. Apresiasi atas Kontribusi Badan Usaha terhadap Penerimaan Negara Bidang Migas:
   - PT Pertamina Patra Niaga
   - PT Kilang Pertamina Internasional
   - PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

5. Apresiasi badan usaha pelaksana penugasan pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM JBT dan/atau JBKP:
   - PT Pertamina Patra Niaga
   - PT AKR Corporindo Tbk

6. Apresiasi badan usaha niaga volume BBM terbesar:
   - PT Kilang Pertamina Internasional
   - PT Pertamina Patra Niaga dan
   - PT AKR Corporindo Tbk

B. Badan Usaha Gas Bumi

1. Badan Usaha Pengangkutan Terbesar Terbaik:
   - PT Transportasi Gas Indonesia
   - PT Pertamina Gas

2. Badan Usaha Niaga Terbesar Terbaik:
   - PT PGN
   - PT Sumber Petrindo Perkasa

3. Badan Usaha Pengangkutan Menengah Terbaik:
   - PT Takisama Prada Internasional
   - PT Majuko utama Indonesia

4. Badan Usaha Niaga Menengah Terbaik:
   - PT Energasindo Heksa Karya
   - PT Surya Energi Parahita

5. Pemerintah Daerah Terbaik Supporting Jargas Non APBN:
   - Pemda Kab Musi Banyuasin
   - Pemda Kab Banyuasin

6. Apresiasi Atas Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Iuran PNBP Bidang Gas Bumi:
   - PT Petrogas Jatim Utama
   - PT Indogas Kriya Dwiguna
   - PT Bayu Buana Gemilang

7. Apresiasi atas Kontribusi Badan Usaha Terhadap Penerimaan Negara Bidang Gas Bumi:
   - PT Pertamina Gas
   - PT Energasindo Heksa Karya
   - PT Kalimantan Jawa Gas

8. Apresiasi badan usaha terbesar yang menjalankan penugasan HGBT dari Pemerintah:
   - PT PGN Tbk

9. Apresiasi badan usaha dalam pengembangan jargas:
   - PT PGN Tbk

C. Apresiasi sinergi badan usaha hilir migas dan BPH Migas dalam penanggulangan bencana di Sumatera
- PT Transportasi Gas Indonesia;
- PT Energasindo Heksa Karya;
- PT Pertamina Patra Niaga;
- PT PGN Tbk;
- PT Pertagas;
- CING CU I Adventures
- PT AKR Corporindo Tbk

D. Apresiasi badan usaha yang mendukung penyediaan dan pendistribusian energi di wilayah terdampak bencana Sumatera:
- PT Pertamina Patra Niaga
- PT Elnusa Petrofin
- PT PGN Tbk.



BPH Migas Perkuat Tata Kelola Hilir Migas untuk Wujudkan Swasembada Energi Nasional

Penguatan tata kelola hilir minyak dan gas bumi menjadi kunci menuju swasembada energi nasional. Melalui sinergi berbagai pihak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mendorong sistem hilir migas yang efisien, transparan, serta andal dalam menjaga ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi melalui jaringan pipa.

"BPH Migas berupaya memastikan ketersediaan dan distribusi energi yang merata bagi seluruh rakyat. Bersama stakeholder, penguatan tata kelola hilir migas antara lain dilakukan melalui pengawasan agar pemanfaatan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi dapat tepat sasaran," ungkap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat membuka Temu Pemangku Kepentingan BPH Migas di Jakarta, Selasa (30/12/2025).







Selain pengawasan, penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyempurnaan regulasi. BPH Migas tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan, mulai dari tata cara pelaporan dan verifikasi iuran badan usaha, penyediaan cadangan operasional BBM, hingga pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

"Regulasi lainnya adalah pengaturan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi badan usaha penerima penugasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Seluruh regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan iklim usaha yang sehat," tambahnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban iuran Badan Usaha, BPH Migas juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sepanjang 2022-2025, dari hasil pemeriksaan terhadap 36 badan usaha, tercatat sekitar Rp104,49 miliar kewajiban pembayaran Badan Usaha yang menjadi temuan, terdiri dari pelaporan volume, harga penjualan yang tidak sesuai, serta ketidakterbukaan kegiatan usaha

Wahyudi menyampaikan, hingga akhir 2025 penyaluran BBM subsidi diperkirakan mencapai 97,33 persen dengan sisa kuota sekitar 518.660 kiloliter (KL), sementara penyaluran BBM kompensasi mencapai 89,92 persen atau menyisakan kuota sekitar 3.148.137 KL.

Pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM dilakukan melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Intelijen Negara, Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri, Pertamina Patra Niaga, Direktorat Jenderal Pajak, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saat ini BPH Migas telah menyiapkan tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara yang dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung nozzle sebagai upaya terpenuhinya subsidi tepat volume, tepat sasaran, dan tepat guna. Di samping itu, BBM subsidi dan kompensasi juga merupakan wujud kehadiran pemerintah sebagai penggerak produktivitas masyarakat dan perekonomian daerah," ujar Wahyudi.



Di sektor gas bumi, tercatat 16 badan usaha niaga, 10 badan usaha pengangkutan, serta 6 badan usaha niaga dan pengangkutan gas bumi. Total volume pengangkutan mencapai 907 juta Million Standard Cubic Feet (mscf), volume niaga 271 juta mscf, dengan panjang jaringan pipa terbangun 22.543,98 kilometer.

Pengembangan jaringan gas bumi (Jargas) mandiri bagi rumah tangga dan pelanggan kecil juga terus didorong. Sepanjang 2021-2025, telah terbangun sekitar 162 ribu sambungan rumah dengan investasi Rp1,4 triliun, yang diharapkan menekan impor bahan baku Liquified Petroleum Gas (LPG) dan mendorong pertumbuhan pelanggan jargas mandiri sebesar 25 persen.

Kinerja penerimaan negara juga menunjukkan hasil positif. "Capaian lainnya adalah kinerja PNBP BPH Migas hingga 25 Desember 2025 telah mencapai Rp1,9 triliun. Terjadi peningkatan 173% jika dibandingkan realisasi pada periode 2021 sebesar Rp1,1 triliun," pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Rizal Suhail menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan usaha hilir migas untuk mendukung ketahanan energi, optimalisasi PNBP, serta efektivitas belanja subsidi agar energi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Sahid Junaidi menekankan pentingnya penegakan hukum yang komprehensif dengan mengedepankan sanksi administratif, guna memastikan kegiatan usaha hilir migas memberi manfaat maksimal bagi negara, rakyat, dan keberlanjutan.

Temu Pemangku Kepentingan BPH Migas 2025 ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Harya Adityawarman, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Hasbi Anshory, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih, serta Badan Usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi.

REVIEW BUKU

Oleh: Ira Ruswati Aprilia
Perencana Ahli Pertama
Pokja Perencanaan dan Pelaporan
Sub Pokja Pelaporan, Akuntabilitas, dan Evaluasi Kinerja

Animal Farm
(Republik Hewan)

"Dan ingat, Kawan-kawan, mantapkan cita-citamu, jangan sampai tergoyahkan." (George Orwell)

Animal Farm (Republik Hewan) merupakan buku karangan George Orwell yang pertama kali terbit pada tahun 1945. Novel setebal 120 halaman ini merupakan novel alegori yang pada awalnya diterbitkan sebagai novel yang menunjukan Gerakan anti-Stalin di Uni Soviet oleh pengarangnya. Terlihat sebagai novel yang bisa dibaca sekali duduk, tapi ternyata sangat jauh dari itu.



Novel ini menjadi novel alegori satir terkait kekuasaan yang berlatar belakang sebuah peternakan bernama Peternakan Manor milik Tuan Jones yang di dalamnya berisi beberapa ekor hewan seperti kuda, babi, ayam, domba, dan angsa. Akibat dari kebiasaan Tuan Jones yang gemar mabuk dan pemalas, akibatnya pertanian menjadi kurang terurus dan timbulah pemberontakan di bawah pimpinan dua ekor babi bernama Napoleon dan Snowball. Di bawah pemberontakan yang awalnya berupaya untuk mewujudkan peternakan yang menghapus ketidaksetaraan dan bertujuan menyejahterakan para penghuninya, lambat laun berkembang menjadi sesuatu yang tidak terduga.

Sejak diterbitkan pertama kali di Inggris, novel ini telah mengalami beberapa kali pencetakan ulang. Di Indonesia sendiri, novel ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama dan telah mengalami sepuluh kali pencetakan ulang. Hal ini menunjukan bahwa meski ditulis pada masa Perang Dunia II, cerita yang diusung nove,l ini masih sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Bahkan, novel ini



telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dengan beberapa penyesuaian dan digunakan sebagai sumber analisis sastra.

George Orwell (25 Juni 1903-21 Januari 1950) adalah nama samaran dari Eric Arthur Blair, penulis dan jurnalis Inggris yang lahir di Bengali (India). Beberapa esai dan novelnya yang terkenal antara lain *Burmese Days, A Hanging Dan Shooting an Elephant, Down And Out In Paris And London, dan Animal Farm*. Sebagian besar hidup profesionalnya, dihabiskan George Orwell sebagai guru dan jurnalis.

Novel Orwell yang paling diingat dunia adalah *Animal Farm* dan *Nineteen Eightyfour*. Buku pertama merupakan alegori tentang pengorupsian ide-ide sosialis di Revolusi Rusia oleh Stalinisme, yang kedua adalah pandangan masa depan Orwell tentang akibat totaliterisme. Karier kesusastraan dan politik Orwell didomniasi oleh ketegangan antara keinginan dan kesetaraan yang lebih besar serta keadilan sosial dan sikap bertentangan pada latar belakang kelas menengahnya.

Hewan-Hewan Inggris

Republik hewan menceritakan tentang kondisi Peternakan Manor milik Tuan Jones. Beberapa tokoh dalam novel ini antara lain babi tua bernama Mayor, kuda penarik pedati bernama Clover dan Boxer, babi muda bernama Napoleon, Snowball, dan Squealer, kuda betina bernama Mollie, tiga ekor anjing bernama Bluebell, Jessi, dan Pincher.

Cerita dimulai dengan pertemuan para hewan pada malam hari di Peternakan selepas Tuan Jones pergi tidur. Dipimpin oleh si tua Mayor, para hewan ini mengadakan rapat rahasia dan mendengarkan orasi Mayor tentang kehidupan para hewan di peternakan Inggris. Menurut Mayor, kehidupan para hewan di peternakan sangatlah menyedihkan. Jam kerja yang panjang, makanan yang sedikit dan kandang yang sempit

menjadi hal yang harus diterima para hewan setiap hari. Mayor juga meyakinkan bahwa semua keburukan pada kehidupan para hewan adalah akibat perbuatan manusia.

Pada pertemuan malam itu, si tua Mayor juga bercerita tentang mimpinya, mimpi tentang dunia ketika manusia telah lenyap. Terakhir Mayor menutup pidatonya dengan bernyanyi sebuah lagu tentang masa keemasan hewan-hewan Inggris yang harus diperjuangkan. Lagu ini membangkitkan semangat para hewan, mereka ikut bernyanyi sepanjang malam sampai Tuan Jones terbangun karena terganggu.

Tujuh Sila

Tiga malam setelah pertemuan rahasia itu, si tua Mayor meninggal. Selama tiga bulan berikutnya banyak sekali dilakukan pertemuan rahasia diantara para hewan yang dipimpin oleh para babi muda, Snowball, Napoleon, dan Squaler. Ketiga babi ini telah mengembangkan ajaran Mayor menjadi serangkaian pemikiran yang mereka beri nama Hewanisme. Nyanyian hewan-hewan Inggris selalu dijadikan lagu penutup dalam setiap pertemuan.

Tanpa dinyana, pemberontakan terjadi lebih cepat dan lebih mudah. Suatu hari saat pertengahan musim panas, hewan-hewan lupa diberi makan. Akhirnya mereka tidak tahan lagi, seekor sapi menabrak pintu gudang makanan dan semua hewan masuk dan makan sesuka hati. Ketika Tuan Jones melihatnya, baku hantam tidak dapat terhindarkan antara hewan dan manusia. Para manusia terkejut karena hewan begitu sangat tidak dapat dikendalikan, Hanya beberapa saat, mereka melarikan diri.

Pada pagi harinya, para hewan tertegun dengan apa yang saat ini mereka hadapi, tanah pertanian itu saat ini sepenuhnya milik mereka. Setelah para hewan sarapan, Snowball dan Napoleon meminta mereka berkumpul kembali. Di depan pintu gerbang yang menghadap jalan besar, Snowball dengan sebatang kuas yang dipegang dengan kaki depannya, menuliskan Pertanian Hewan menggantikan Pertanian Manor. Itulah nama pertanian mereka mulai saat ini.

Kemudian, Snowball meringkas prinsip Hewanisme dan menuliskannya di dinding, yang di ringkas menjadi Tujuh Sila yang berbunyi sebagai berikut:

yang berjalan dengan dua kaki adalah musuh
yang berjalan dengan empat kaki, atau punya sayap, adalah kawan
hewan tidak diperkenankan memakai pakaian
hewan tidak boleh tidur di tempat tidur
hewan tidak boleh meminum alkohol
hewan tidak boleh membunuh hewan lain
semua hewan sama derajatnya

Kincir Angin

Setelah pemberontakan itu, para hewan sibuk bekerja di peternakan. Memanen jerami, jagung dan buah-buahan serta memerah susu. Pada awalnya sulit bagi mereka untuk melakukan kegiatan di peternakan tersebut, namun para hewan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, para hewan khususnya babi, juga belajar berbagai pekerjan lain dari buku yang mereka ambil dari rumah pertanian, seperti pekerjaaan pandai besi, tukang kayu, dan pekerjaan lain. Sementara, Snowball menyibukkan diri dengan menyusun organisasi para hewan. Namun, Napoleon tidak tertarik dengan pembentukan organisasi tersebut.

Pada akhir musim jerami, para anjing melahirkan sembilan anak yang sehat, setelah mereka disapih, Napoleon membawanya untuk diasingkan, dan berjanji mengawasi perkembangan para anak anjing tersebut.

Seiring waktu, Snowball telah memperlajari berbagai artikel di majalah petani dan peternak, sehingga memunculkan berbagai ide pembaruan tentang pengelolaan peternakan mereka. Yang terbaru Snowball merencanakan pembangunan kincir angin yang nantinya dapat menghidupkan dinamo dan mengaliri listrik ke peternakan mereka.

Rencana pembangunan kincir angin tersebut telah matang

dan pada pertemuan berikutnya Snowball menyampaikan rencana tersebut. Seperti biasa, Napoleon termasuk yang menyangkal bahwa pembangunan kincir angin dapat dilaksanakan. Para hewan terbagi menjadi dua bagian, yang mendukung pembangunan kincir angin dan yang tidak. Namun, pidato Snowball membuat mereka terbuai, sehingga pada akhir pemungutan suara sudah dapat dipastikan para hewan memihak ke mana.

Pada saat itu terjadi, Napoleon melirik aneh pada Snowball kemudian mengeluarkan siulan yang tidak pernah terdengar sebelumnya.

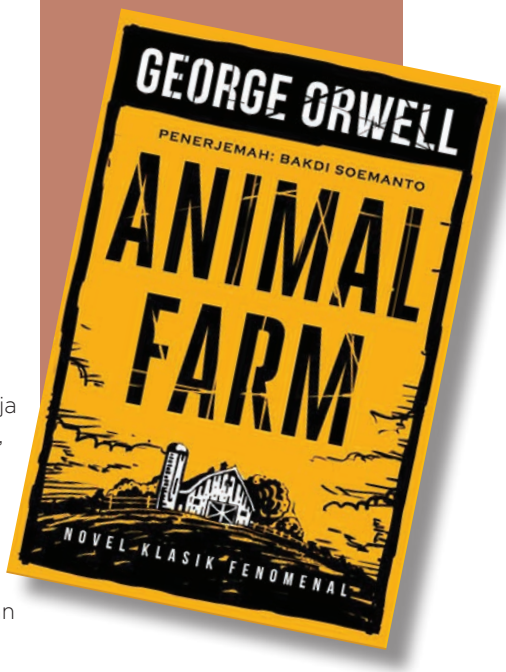
Saat itu juga, sembilan anjing dengan muka galak menyalak ke arah Snowball sampai ia lari meninggalkan peternakan. Hewan yang lain terkejut, tidak menyangka akan kehadiran anjing galak tersebut. Seketika mereka teringat pada anak-anak anjing yang diasuh langsung oleh Napoleon beberapa waktu lalu. Yang mengherankan tiga minggu setelah pengusiran Snowball, Napoleon mengumumkan bahwa pembangunan kincir angin dapat dilaksanakan.

Babi dan Manusia

Setelah kepergian Snowball, peternakan hewan dipimpin oleh Napoleon. Beberapa waktu berlalu, dan para hewan menyadari bahwa kehidupan mereka lebih buruk dari sebelumnya. Hewan-hewan Inggris dan Tujuh Sila tidak pernah lagi terdengar. Jam kerja panjang, kekurangan makanan, dan kandang yang dingin menjadi makanan sehari-hari.

Dalam hal hubungan dengan manusia, Napoleon menjalin hubungan transaksional dengan petani dari daerah lain yaitu Tuan Pilkington. Napoleon memerintahkan para ayam untuk memberikan telur yang mereka hasilkan untuk dapat dijual kepada Tuan Pilkington. Kehadiran manusia dalam peternakan hewan saat ini tidak mendapat penolakan dari Napoleon.

Suatu hari para hewan mendengar suara ribut-ribut dari rumah Tuan Jones, Ketika mereka mengintip, mereka melihat Napoleon dan Tuan Pingkilton memainkan kartu as sekop bersama. Para hewan di luar melihat ke dalam, kemudian mereka menyadari bahwa rupa Napoleon dan Tuan Pingkilton semakin mirip. Mereka melihat bergantian antara keduanya, dan tidak menemukan perbedaan antara babi dan manusia.



KESIMPULAN

Gaya penulisan narasi menggunakan alegori justru menjadikan novel ini ringan dan enak dibaca. Walaupun, ditulis pada masa Perang Dunia II, sampai sekarang novel ini masih relevan untuk dibaca. Isi buku yang menggambarkan kondisi kekuasaan, pemberontakan dan penggulingan suatu tiran masih menjadi hal yang menarik untuk dibahas sepanjang zaman. Semangat pembaruan, dan cita-cita kemerdekaan yang nampak indah pada awalnya, tapi pada akhirnya justru membawa pada kesengsaraan yang baru.

*** Tulisan merupakan opini pribadi, tidak mewakili instansi.**

BPHMIGAS

Badan Pengatur Hilir Migas

Menjamin

Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Mengoptimalkan pemanfaatan Gas Bumi melalui Pipa hingga Pelosok Negeri



Visi dan Misi

Badan Pengatur Hilir Migas

Vision

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

Mission

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri